

PDIP Bantu Salurkan Air Bersih

SALATIGA (KR) - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDIP) Salatiga membantu salurkan air bersih sebanyak 6 mobil tangki/hari. Ketua DPC PDIP Salatiga yang juga Ketua DPRD Salatiga, Dance Ishak Palit kepada *KR* mengatakan akibat kemarau panjang ini beberapa daerah di Salatiga bagian atas di wilayah Kecamatan Argomulyo mengalami krisis air bersih. Kelurahan itu, adalah Noborejo, Kumpulrejo dan Randuacir. Setidaknya tiga kelurahan tersebut terdapat 600-700 kepala keluarga (KK) kekurangan air bersih.

"Untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, Kami dari PDIP Salatiga setiap hari dropping air bersih 6 tangki mobil air ke lokasi," kata Dance Ishak Palit, Kamis (26/10). Ia juga mengungkapkan suhu ekstrem panas di Salatiga akhir-akhir ini meningkat. Ke depan diharapkan OPD terkait melakukan antisipasi lebih dini. Bantuan air PDIP Salatiga ke warga untuk mengisi bak tampungan milik warga untuk cadangan air bersih. Sementara itu Kota Salatiga sudah mulai diguyur hujan dengan intensitas sedang. (Sus)-f

LDII Wonogiri Salurkan Bantuan Air Bersih

WONOGIRI (KR) - Dua wilayah kecamatan di Wonogiri yakni Kecamatan Jatiroto dan Kismantoro yang biasanya cukup air, tahun ini masuk dalam daftar kecamatan terdampak kekeringan atau krisis air bersih. Melalui program #KERJABERSAMABAKTIUNTUKNEGARI, DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Wonogiri, Kamis (26/10), menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 30 tanki untuk dua wilayah kecamatan itu.

Sejumlah pengurus LDII Wonogiri yang dipimpin Plt Ketua Agung Susanto SE dan Wanhat KH Sunadi Ali Mustofa, H Suratmin SSos, secara simbolis menyerahkan bantuan air di Desa Guno Jatiroto. Empat desa di Kecamatan Jatiroto yakni Desa Guno, Desa Dawungan, Desa Boto dan Desa Brenggolo seadikannya 230 kepala keluarga (KK) kini kekurangan air minum.

Kapolsek Jatiroto, Iptu Pudyono SH MH saat menerima secara simbolis bantuan air bersih dari DPD LDII Wonogiri di rumah Sayono, warga Dusun Pagersari, Desa Guno, Jatiroto, Kamis (26/10/2023) menuturkannya di Dusun Pagersari Desa Guno warga yang dilanda krisis air bersih ada 50 KK. "Jumlah tersebut bisa bertambah lagi kalau tidak segera turun hujan. Sebab, sumber-sumber air di pegunungan Brenggolo sudah kering tidak ada airnya," papar Pudyono didampingi Kepala Dusun Pagersari Marsudi SIP.

Menurut Agung Susanto bakti sosial berupa bantuan air bersih ini dilakukan keluarga besar LDII sebagai bentuk sosial dan rasa kemanusiaan terhadap sesama. "Kami mendapatkan laporan dari pengurus PC LDII Jatiroto dan Kismantoro terkait adanya warga yang kesulitan mendapatkan air bersih karena dampak kemarau panjang. Kami berkolaborasi dengan pengurus pusat (DPP) secara spontan akhirnya bisa menyerahkan 30 tanki air bersih ini," tuturnya. (Dsh)-f



KR-Djoko Santoso

Pengurus dan anggota LDII Wonogiri memberikan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan.

Pemprov Jateng Salurkan Bantuan Air Bersih

SEMARANG (KR) - Untuk membantu masyarakat yang dilanda kekeringan di sejumlah daerah di Jawa Tengah, Pemprov Jateng melakukan dropping air bersih sebanyak 76.434.000 liter ke sejumlah titik kekeringan, di 34 kabupaten/kota Jawa Tengah yang terdampak kekeringan.

Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana, Kamis (26/10) menyampaikan berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, per 23 Oktober 2023, 76 juta liter air bersih tersebut disalurkan ke 1.382 desa di 340 kecamatan. Distribusi air bersih dilakukan oleh BPBD Jawa Tengah bersama BPBD kabupaten/kota, Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, PMI, serta instansi terkait lainnya termasuk BBWS, Polri, dan bantuan masyarakat.

Daerah paling banyak terdampak kekeringan adalah Kabupaten Blora dengan 156 desa di 16 kecamatan, Kabupaten Grobogan 137 desa di 20 kecamatan, Kabupaten Demak 85 desa di 14 kecamatan, Kabupaten Purworejo 79 desa di 15 kecamatan, dan Kabupaten Pati 74 desa di 14 kecamatan. Nana Sudjana mengatakan, perubahan iklim dan fenomena elnino mengakibatkan terjadinya kekeringan di sejumlah wilayah. Kekeringan itu tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi juga terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Di Jateng tercatat ada 34 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan meskipun tingkat kekeringan di masing-masing wilayah berbeda. "Pemprov Jawa Tengah sudah melakukan langkah-langkah dan sudah memetakan daerah mana saja yang sudah (terdampak) kekeringan. Itu yang segera kami lakukan bantuan ke daerah yang memang sangat membutuhkan," tutur Nana Sudjana. (Bdi)-f



KR-Budiono

Nana Sudjana turun menuangkan air di ember-ember milik warga.

GKMNU Diminta Bergerak Serentak di Jateng

REMBANG (KR) - Menteri Agama RI Yaquut Cholil Qoumas meminta program Gerakan Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama (GKMNU) sudah mulai diimplementasikan ke masyarakat mulai November 2023. Menag meminta program GKMNU digelar secara serentak.

Pesan ini disampaikan Menag saat menghadiri Silaturahmi Kasatgas Provinsi dan Kasatgas Kabupaten GKMNU se-Jawa Tengah di Kabupaten Rembang, Kamis (26/10). "Saya ingin kegiatan ini segera dilakukan di seluruh cabang, 35 cabang. Dan saya ingin kegiatan GKMNU ini secara serentak," ucap Menag.

Pria yang akrab disapa Gus Men ini mengatakan, ada tiga program yang akan segera dilaksanakan bersama hingga tingkat desa.

Pertama, Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Ini bisa dilakukan oleh kader GKMNU di tingkat kecamatan.

Kedua, jelasnya, Program Berkah Keuangan Keluarga. Kader GKMNU diharapkan mampu memberikan bimbingan bagaimana cara mengelola keuangan bagi keluarga. Sehingga, warga mampu mengatur keuangan keluarga secara lebih efektif.

"Ketiga, Program Bimbingan Keluarga. Program ini diharapkan mampu memberikan edukasi agar warga memiliki kesadaran dalam mengelola konflik rumah tangga," pesan Gus Men. Menag yang juga Kepala Satuan Tugas Nasional GKMNU berharap, tiga program tersebut dapat segera diimplementasikan kepada

masyarakat. "Program Gerakan Keluarga Masalah ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Saya minta ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh," ujarnya.

Wakil Kepala Satgas Nasional GKMNU Ishfah Abid Aziz menambahkan, para kasatgas tingkat Kabupaten/Kota, diminta segera melengkapi struktur hingga tingkat desa. "Yang paling penting saat ini agar bagaimana struktur bisa dilengkapi, sampai tingkat desa, diisi lima hingga tujuh orang," katanya.

"Perekrutan kader tersebut, bisa dilakukan secara paralel dengan program lainnya. Saya harap kelengkapan struktur hingga tingkat desa bisa diselesaikan selama November ini," ujar Ishfah, yang juga salah satu

Ketua PBNU. Untuk memudahkan koordinasi dan akselerasi implementasi program, Satgas Nasional GKMNU akan membuat aplikasi khusus. Aplikasi itu juga akan digunakan sebagai sarana menyampaikan amanat dan instruksi harian dari Ketua Umum PBNU serta Kasatgasnas GKMNU

kepada para kader.

"Dengan data base yang ada nantinya kita bisa secara terstruktur dan efektif dalam pengimplementasian program GKMNU ini," imbuh Wibowo Prasetyo, Koordinator Media Satgasnas GKMNU. Wibowo menambahkan aplikasi ini juga rencananya akan dilengkapi



KR-Istimewa

Menag (tengah) saat menghadiri silaturahmi Kasatgas Provinsi dan Kasatgas Kabupaten GKMNU se-Jateng.

Satpam Masuk Sistem Pendingin Suhu Politik

KARANGANYAR (KR) - Satpam selaku aparat pengamanan terbatas, berperan dalam mendinginkan suhu politik jelang Pemilu 2024. Mereka menjadi penebag apabila muncul gesekan di lingkungan kerja akibat para karyawan yang berbeda sudut pandang.

Demikian disampaikan Ketua BPD Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABU-JAPI) Jateng, Agus Nurwijanarko saat menyampaikan materi workshop Perkumpulan Satpam Polres Karanganyar (PASKA) bertajuk Peningkatan Kompetensi Satpam dalam rangka Mendukung Pemilu 2024 di rumah dinas bupati, Kamis (26/10).

"Satpam jadi cooling system untuk Pemilu 2024. Kuncinya, satpam harus netral. Satpam menengahi perselisihan di lingkungan

kerja. Makin mendekati pemungutan suara, dimungkinkan warna politik mulai tampak di lingkungan kerja. Jika perbedaan ini memicu gesekan, satpam wajib bertindak mendinginkan suasana," katanya.

Dalam workshop itu, Agus menekankan profesi satpam setara mata pencaharian para profesional lainnya seperti dokter maupun pengacara. Sehingga untuk meraih profesi satpam perlu mengantongi sertifikat keahlian dan kompetensi. Agus mengatakan

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) siap mengakomodasi kebutuhan tersebut. Para satpam, menurutnya tak boleh puas dengan hanya memiliki kualifikasi garda pratama. Namun juga sertifikat kompetensi berlogo garuda emas, dimana kualifikasi satpam diakui secara nasional dan internasional. Kepada para pengusaha jasa keamanan, diimbau menggandeng Badan Usaha Jasa Keamanan (BUJK) legal.

"BUJK yang legal pasti memulikan profesi satpam. Profesi ini tak akan dihargai murah karena memperolehnya susah. Semua sertifikasi dan perizinan harus terpenuhi," katanya. Di Karanganyar, ia menyebut 90 persen satpam mengantongi legalitas profesi dan tergabung di organisasi. Ia

mendorong pemerintah serta para investor mendukung pemenuhan standardisasi satpam.

"Biaya pendidikan satpam memang tidak murah, berkisar Rp 3,5 juta-Rp4 juta. Ada beasiswa dari Dinas Ketenagakerjaan, subsidi program dan kami mendorong perusahaan mau menanggung biaya itu bagi satpam," katanya. Ketua PASKA Suyitno mengatakan workshop diikuti 120 peserta. Sebelumnya, para peserta mengikuti latihan pemadaman kebakaran di Tasikmadu pada September 2023. Agenda selanjutnya pembinaan fisik anggota PASKA. "Kita terus mengajak rekan-rekan seprofesi agar masuk organisasi. Banyak benefit seperti dukungan Polres dan pemda di kegiatan-kegiatan," katanya. (Lim)-f

Bunga Tabebuaya Bermekaran di Magelang

MAGELANG (KR) - Semenjak beberapa hari terakhir ini di beberapa lokasi di wilayah Kota Magelang dihiasi dengan keberadaan Bunga Tabebuaya yang sedang bermekaran. Warna bunga ada yang ungu, merah dan putih. Bahkan ada juga yang berwarna kuning di beberapa titik lokasi.

Keberadaan Bunga Tabebuaya ini juga sempat memperoleh perhatian tersendiri dari masyarakat.

Tidak sedikit yang mengabadikan keberadaan Bunga Tabebuaya ini dengan kamera handphone (HP) yang dibawanya. Ini seperti yang terlihat di daerah Tuguran wilayah Kecamatan Magelang Utara maupun di lokasi lain, Kamis (26/10).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang M Yunus kepada wartawan, Kamis, diantaranya mengatakan Tabebuaya dengan daun lebih kecil dan bunga kuning sudah lebih dahulu ditanam dibanding yang lain. Bunganya lebih banyak, dan warna bunganya hanya kuning.

Mulai tahun 2015-2017, juga hingga tahun 2022 juga masih ada penanaman, namun yang terbanyak penanamannya di tahun 2015-2017. Saat itu yang ditanam jenis Tabebuaya daun lebar, dengan bunga warna-warni merah, ungu dan putih.

Awalnya bunga ini ditanam di depan kompleks Kantor Walikota Magelang di tepi Jl Sarwo Edi Wibowo, Jl A Yani depan Rindam IV/Diponegoro maupun lainnya.

Untuk yang di tepi Jl S Parman (Tuguran) dan Jl P Diponegoro ditanam sekitar tahun 2020. "Rata-rata ditanam di jalan protokol, dan mungkin sekunder," kata M Yunus. (Tha)-f

PPID Klaten Targetkan Predikat Informatif

KLATEN (KR) - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Klaten targetkan predikat informatif dalam ajang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Tingkat Provinsi Jateng 2023.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Jajang Prihono saat visitasi money Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023 oleh Komisi Informasi Provinsi Jateng di Ruang Rapat B2 Setda Klaten, Selasa (24/10).

"Saya sampaikan hasil dari pemeringkatan ini tahun 2020 sampai 2022 kategori levelnya masih sama yaitu menuju informatif. Semoga lebih maksimal lagi dan lebih termotivasi dan bisa naik ke level informatif," kata Sekda.

Dalam paparannya, Sekda berharap dengan visitasi dari tim visitasi Komisi Informasi Provinsi Jateng membawa dampak positif bagi PPID Kabupaten Klaten.

Ketua Tim Komisi Informasi Provinsi Jateng, Moh.Asropi menjelaskan hasil penilaian Kabupaten Klaten yang telah dilakukan sebelum visitasi.

Klaten mengalami peningkatan dari rasio penilaian dengan memperoleh jumlah diatas 70, sehingga masuk ke tahap berikutnya yaitu visitasi.

Asropi juga menyampaikan akan mendatangi empat badan publik dalam rangka penilaian ini.

"Kami akan menilai pada sisi dokumentasi dan empat badan publik yaitu PPID, dua Desa yakni Desa Soka dan Desa Balerante, dan RSUD dr. Soeradji Tirtonegoro," kata Asropi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, Amin Mustofa menyampaikan rasa syukur Kabupaten Klaten ditetapkan sebagai salah satu Badan Publik yang lolos dari tahap I dan tahap II.

"Sehingga hari ini berkah alhamdulillah, Kabupaten Klaten kehadiran atau masuk tahapan visitasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dan nanti teman-teman PPID di Klaten bisa meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan mengambil saran dan nasihat dari tim money," kata Amin Mustofa. (Sit)-f

Bantuan Modal Usaha Percepat Atasi Kemiskinan

PEKALONGAN (KR) - Untuk mempercepat mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Bantuan yang bersumber dari Baznas Jateng itu diberikan kepada 150 mustahik produktif dan 30 pendamping mustahik di Kabupaten Pekalongan, Kendal, Batang, dan Kota Pekalongan.

Demikian dikatakan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana kepada wartawan usai menyerahkan bantuan modal usaha produktif di Kabupaten Pekalongan, Kamis (26/10). Total bantuan yang diberikan kepada 180 penerima manfaat sebesar Rp 472.500.000, dengan rincian Rp 3 juta untuk 150 mustahik usaha produktif ditambah Rp100 ribu uang transport, dan Rp

250.000 untuk 30 pendamping mustahik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tercatat sekitar 3,971 juta jiwa, atau 10,77% dari total penduduk Jawa Tengah. Dari jumlah itu, sekitar 1,97% di antaranya masuk dalam kategori miskin ekstrem yang tersebar di 923 desa di 17 kabupaten.

Dikatakan Nana, percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, namun butuh kolaborasi banyak pihak. Salah satu yang dilakukan oleh Pemprov Jateng adalah berkolaborasi dengan Baznas Jateng untuk memberikan pendampingan dan pembinaan ekonomi kerakyatan.

Nana Sudjana berharap bantuan modal usaha tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk

membangun dan mengembangkan usaha. Jumlah yang diberikan memang tidak besar, namun cukup untuk memberikan rangsangan atau memacu masyarakat dalam berwirausaha. Penerima bantuan sebelumnya diberikan pembinaan dan pelatihan usaha. Mereka dibimbing langsung oleh Baznas Jateng dan Pemda masing-masing. Setelah dilakukan pembimbingan, modal usaha baru diberikan. Ini rangsangan agar mereka lepas dari kemiskinan.

Ketua Baznas Jateng Ahmad Daroji mengatakan, bantuan modal usaha produktif untuk mustahik ini merupakan bentuk keseriusan Baznas Jateng untuk terlibat langsung dalam penanggulangan kemiskinan. Melalui program itu, Baznas bertekad untuk mengubah para mustahik kelas menjadi muzakki (pemberi zakat). "Mudah-mudahan tuju-

an kami ini berhasil. Untuk itu kami memberikan pelatihan kerja dan modal usaha produktif. Pendampingan kami lakukan melalui penyuluh agama tingkat kecamatan. Mereka dekat dengan penerima, sehingga monitoring dapat berjalan dengan baik," tutur KH Daroji.

Beberapa bidang usaha

yang digeluti oleh para penerima bantuan itu meliputi usaha kuliner, toko kelontong, laundry, konveksi, jasa bengkel, pertanian, perikanan, dan peternakan. Baznas Jateng juga berniat untuk memberikan penghargaan khusus kepada para mustahik yang sudah berhasil menjadi muzakki. (Bdi/Riy)-f



KR-Budiono

Nana Sudjana secara simbolis menyerahkan bantuan modal usaha kepada para mustahik (penerima zakat).